

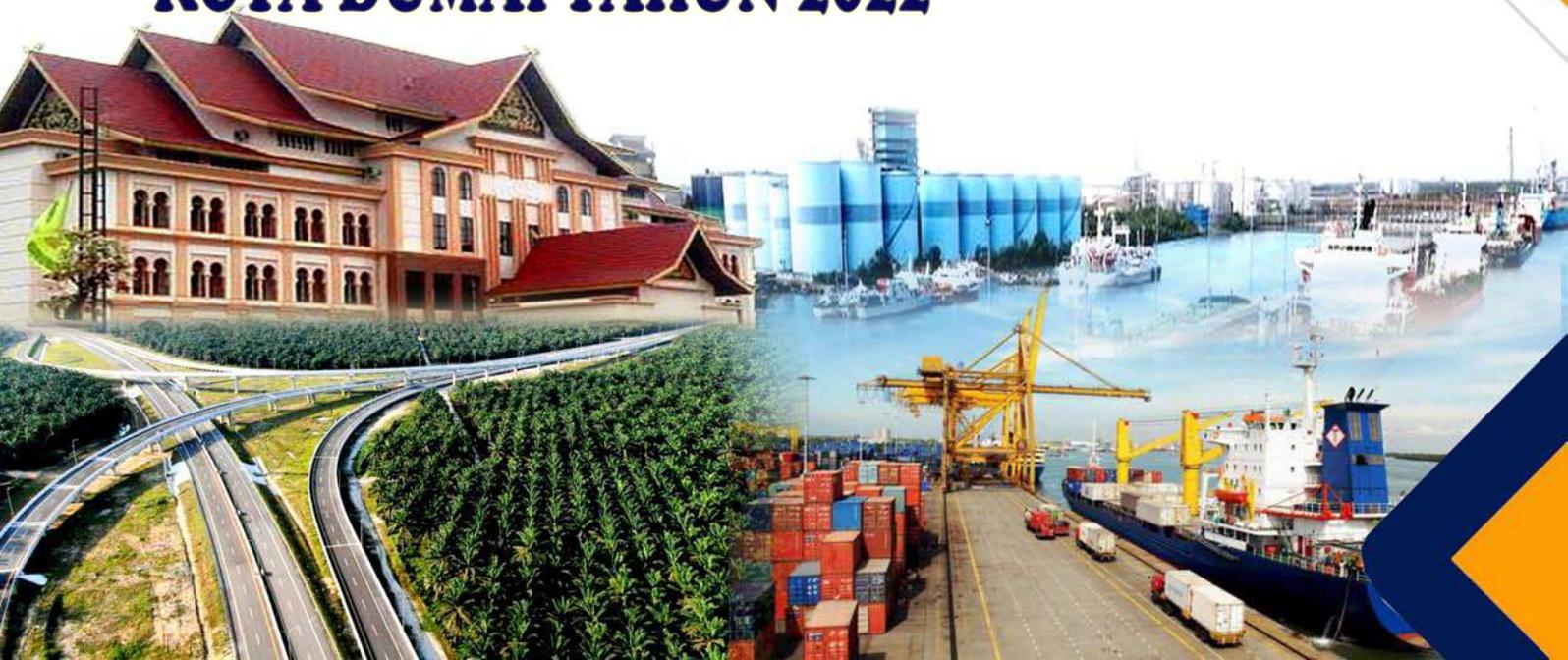


PEMERINTAH KOTA DUMAI



# R-LPPD

## RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022





PEMKO DUMAI

## *K*ata Pengantar

*P*uji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatNya sehingga diberikan kekuatan serta kemampuan untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diamanahkan berupa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan kepada Pemerintahan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta keragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

*S*esuai pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 18 Tahun 2020 RLPPD disampaikan oleh Kepala Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat, sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap apa yang sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan yang dimiliki.

*T*entunya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan maupun tantangan, namun demikian dengan semangat dan tekad yang bulat serta dengan mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki dan adanya dukungan dari seluruh komponen masyarakat maka penyelenggaraan Pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Adalah menjadi harapan kita semua, bahwa kuantitas dan kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat semakin baik dan meningkat setiap tahunnya. Amin.

Dumai, April 2023

WALIKOTA DUMAI

H. PAISAL, SKM, MARS



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>DAFTAR TABEL</b>	iii
<b>DAFTAR GRAFIK</b>	iv
<b>1. Capaian Kinerja Makro</b>	<b>1</b>
a. Indeks Pembangunan Manusia	1
b. Angka Kemiskinan	2
c. Angka pengangguran	5
d. Pertumbuhan Ekonomi	6
e. Pendapatan Per Kapita	11
f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)	13
<b>2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar</b>	<b>14</b>
1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran (output)	16
2. Indikator Kinerja Kunci Hasil (Outcome)	37
<b>3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya</b>	<b>44</b>
<b>4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Daerah</b>	<b>44</b>
<b>5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan</b>	<b>56</b>
<b>6. Inovasi Daerah</b>	<b>59</b>
<b>P E N U T U P</b>	<b>63</b>



## DAFTAR TABEL

			<b>Hal</b>
Tabel	1	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2011-2020	1
Tabel	2	Kondisi IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau Tahun 2017-2021	2
Tabel	3	Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2016-2021	3
Tabel	4	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliar rupiah) 2016-2020	5
Tabel	5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen) 2017-2021	7
Tabel	6	Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (2010=100), 2017-2021	8
Tabel	7	Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2017-2021	9
Tabel	8	Perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita Provinsi Riau Tahun 2016-2021	12
Tabel	9	Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2016-2021	13
Tabel	10	Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2022 dan Perwako No. 80 Tahun 2022	45
Tabel	11	Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022	45
Tabel	12	Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022	54
Tabel	13	Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022	56
Tabel	14	Data Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kota Dumai Tahun 2022	57
Tabel	15	Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan	59



PEMKO DUMAI

## DAFTAR GRAFIK

			<b>Hal</b>
Grafik	1	Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional Tahun 2016-2021	1
Grafik	2	Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai	4
Grafik	3	Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Dumai Tahun 2016-2021	5
Grafik	4	Tingkat Pengangguran Terbuka Berdasarkan Kondisi Nasional Propinsi Riau dan Kota Dumai	5
Grafik	5	Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Propinsi Riau Tahun 2016-2021	14



## CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

### 1. Capaian Kinerja Makro

#### a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran pencapaian suatu daerah atau negara dalam tiga dimensi pembangunan manusia yaitu peluang hidup, pengetahuan, dan standar hidup layak.

Selama periode 2017-2021 IPM Kota Dumai terus meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena menurunnya pendapatan perkapita yang disesuaikan (daya beli Masyarakat) dikarenakan tekanan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sejak tahun 2017 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2021 adalah sebesar 73,46; 74,06 ; 74,64 ; 74,40; 74,75.

Tabel. 1  
Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional  
Tahun 2017-2021

Cakupan Wilayah	2017	2018	2019	2020	2021
Kota Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75
Provinsi Riau	71,79	72,44	73,00	72,71	72,94
Nasional	70,81	71,39	71,92	71,92	72,29

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2022)

Grafik. 1  
Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Nasional  
Tahun 2016-2021



(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2022 )



Selama periode 2017-2021 IPM Kota Dumai terus meningkat namun mengalami penurunan pada tahun 2020 karena menurunnya pendapatan perkapita yang disesuaikan (daya beli Masyarakat) dikarenakan tekanan perekonomian yang disebabkan oleh pandemi Covid-19. Sejak tahun 2017 IPM Kota Dumai berada pada kategori tinggi dengan angka berturut-turut sampai tahun 2021 adalah sebesar 73,46; 74,06 ; 74,64 ; 74,40; 74,75.

Jika dibandingkan dengan 11 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Riau, selama kurun waktu 2017-2021, IPM Kota Dumai menempati urutan kedua setelah Kota Pekanbaru seperti yang tersaji pada Tabel 2 dibawah. Pada tahun 2021, dari 12 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, hanya 6 kabupaten/kota yang memiliki angka IPM dengan kategori tinggi, yaitu: Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, Kampar, dan Pelalawan.

Tabel. 2  
Kondisi IPM Kabupaten/ Kota di Provinsi Riau  
Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kuantan Singingi	69,53	69,96	70,78	70,31	70,60
Indragiri Hulu	68,97	69,66	70,05	69,83	70,01
Indragiri Hilir	66,17	66,51	66,84	66,54	66,63
Pelalawan	70,59	71,44	71,85	71,56	72,08
Siak	73,18	73,73	74,07	73,68	73,98
Kampar	72,19	72,50	73,15	72,83	73,02
Rokan Hulu	68,67	69,36	69,93	69,38	69,67
Bengkalis	72,27	72,94	73,44	73,46	73,58
Rokan Hilir	67,84	68,73	69,40	69,15	69,34
Kepulauan Meranti	64,70	65,23	65,93	65,50	65,70
Pekanbaru	79,97	80,66	81,35	81,32	81,58
Dumai	73,46	74,06	74,64	74,40	74,75

(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2022)

## b. Angka Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB perkapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk



mencukupi kebutuhan hidup minimal. Indikator kemiskinan umumnya menggunakan criteria garis kemiskinan (*poverty line*) untuk mengukur kemiskinan absolut. Kemiskinan absolute adalah ukuran angka atau hitungan perkepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut.

Kemiskinan absolut adalah ukuran angka atau hitungan per kepala (*headcount*) tentang seberapa banyak orang yang penghasilannya berada dibawah garis kemiskinan absolut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. perkembangan beberapa indikator kemiskinan seperti jumlah penduduk miskin. tingkat kemiskinan (P0). indek kedalaman kemiskinan (P1). indek keparahan kemiskinan (P2) dan Garis Kemiskinan (P4) di Kota Dumai tahun 2016-2021 fluktuatif seperti yang tersaji pada Tabel dibawah ini.

Tabel. 3

**Perkembangan Indikator Kemiskinan Kota Dumai Tahun 2016-2021**

No	Indikator Kemiskinan	TAHUN						Rata-Rata Pertumbuhan (%)
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Jumlah Penduduk Miskin (Ribuan Orang)	13.76	13.53	11.19	10.95	9.88	10.57	-4.78
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	4.74	4.57	3.71	3.56	3.16	3.42	-5.89
3	Indek Kedalaman Kemiskinan (P1)	0.62	0.84	0.46	0.28	0.31	0.40	-1.83
4	Indek Keparahan Kemiskinan (P2)	0.13	0.25	0.07	0.05	0.05	0.07	6.35
5	Garis Kemiskinan (Rp. Bulan/Kapita)	369.624	403.244	418.597	439.152	484.609	509.002	6.64

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka. 2016-2021)

Perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Dumai secara signifikan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 tingkat kemiskinan sebesar 4.74%. menurun menjadi 3.42% pada tahun 2021. Selama periode 2016-2021. tingkat kemiskinan rata-rata menurun sebesar -5.89% per tahun. Tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2021 sebesar 3.42% lebih rendah dibandingkan tingkat kemiskinan Provinsi Riau sebesar 7.12% tahun 2021.



Grafik. 2  
Perkembangan Angka Kemiskinan Kota Dumai



(Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2022)

Perkembangan tingkat kedalaman kemiskinan (poverty gap index- P1), Indeks P1 Kota Dumai pada tahun 2016-2021 mengalami perkembangan pengurangan gap antara pendapatan dengan garis kemiskinan. Misalnya nilai indeks P1 pada tahun 2016 sebesar 0,62%, artinya RTM yang terdapat di Kota Dumai masih kekurangan pendapatan sebanyak 0,62% untuk memenuhi pengeluaran minimal garis kemiskinan. Namun pada tahun 2021 sudah mengalami pengurangan gap antara pendapatan RTM dengan pengeluaran minimal garis kemiskinan menjadi 0,4%. Jika dilihat indeks tersebut menunjukkan bahwa terjadinya perbaikan dalam kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Semakin kecil P1 maka semakin besar potensi ekonomi untuk dana pengentasan berdasarkan identifikasi karakteristik penduduk miskin juga untuk target sasaran bantuan dan program. Artinya kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin rendah.

Pada Grafik 3 terlihat bahwa posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai masih berada di bawah rata-rata Provinsi Riau. Artinya wilayah kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan masih lebih rendah di wilayah ini dibandingkan dengan wilayah lainnya di Provinsi Riau. Namun Kota Dumai memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) penurunan yang lebih cepat dari Provinsi Riau. jelasnya lihat pada Grafik 3



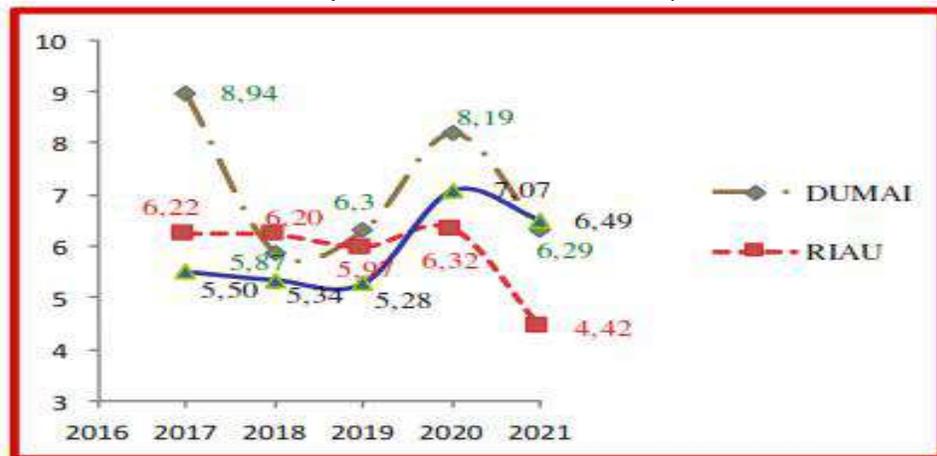
Grafik. 3  
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Dumai, Provinsi Riau dan Nasional 2016-2021



**c. Angka pengangguran**

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Grafik. 4  
Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan kondisi Nasional, Provinsi Riau dan Kota Dumai;



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah



#### d. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) disajikan menurut harga konstan dan harga berlaku. Berdasarkan data PDRB atas dasar harga konstan dapat dihitung pertumbuhan ekonomi yang mengGrafikkan pertambahan riil kemampuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dengan PDRB atas dasar harga berlaku dapat dilihat struktur ekonomi yang mengGrafikkan andil masing-masing sektor.

Bila kita lihat angka PDRB tahun 2020–2021 atas dasar harga berlaku menurut lapangan usaha terjadi kenaikan dari 36.326,79 miliar rupiah pada tahun 2020 meningkat menjadi 39.999,41 miliar rupiah di tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 4  
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (miliarrupiah), 2016–2020

Lapangan Usaha/Industry (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	1 806,63	1 875,18	1 923,18	2079,21	2303,17
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	116,79	120,04	128,17	129,55	132,99
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	16 611,66	18 660,48	20 865,62	21785,57	24346,07
D Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	27,10	28,10	31,77	73,72	92,98
E Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,74	4,88	5,33	5,60	6,04
F Konstruksi/Construction	3 533,02	3 786,76	4 049,17	3941,63	3995,66
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	5 250,80	5 413,96	5 736,85	5258,19	5873,68
H Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	918,54	973,79	1 055,63	726,94	759,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	280,82	303,73	319,62	260,31	314,99
J Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	333,68	380,26	418,39	457,24	478,07
K Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance	375,46	390,06	397,13	409,20	449,22



PEMKO DUMAI

Activities						
L	Real Estat/Real Estate Activities	143,28	153,05	161,76	164,08	168,40
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	1,66	1,84	2,06	1,63	1,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	553,24	568,68	587,76	590,24	605,35
P	Jasa Pendidikan/Education	155,05	161,94	177,13	185,34	192,27
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	53,47	56,82	65,84	77,38	86,28
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	176,90	196,64	220,03	181,04	193,57
<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>		<b>30 342,84</b>	<b>33 076,21</b>	<b>36 147,15</b>	<b>36 326,79</b>	<b>39 999,41</b>

Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 menurut lapangan usaha tercatat 24.597,99 Miliar rupiah pada tahun 2020 meningkat menjadi 26.068,58 miliar rupiah pada tahun 2021. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 5  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (persen), 2017–2021

	Lapangan Usaha/Industry (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	3,31	2,77	2,01	4,15	3,97
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	-4,95	-3,75	2,30	-1,32	0,65
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	5,17	7,51	7,18	3,01	6,56
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	1,04	3,21	7,29	138,28	26,75
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan D ur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	4,60	1,13	6,24	3,90	7,78
F	Konstruksi/Construction	5,34	2,58	4,15	-3,02	0,05
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,84	1,91	2,87	-10,30	9,02
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	4,82	3,85	5,35	-34,64	0,42



I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	6,30	6,46	3,72	-19,50	19,10
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	6,25	5,75	7,21	9,24	4,13
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	-0,74	2,09	0,11	3,44	4,47
L	Real Estat/Real Estate Activities	3,43	3,81	5,29	1,63	2,60
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	6,91	9,07	7,74	-22,06	1,65
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	0,11	0,28	2,33	-2,16	2,15
P	Jasa Pendidikan/Education	2,70	3,94	5,62	1,41	2,55
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	5,49	5,57	10,83	14,62	10,32
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	7,99	8,61	8,79	-20,03	5,84
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>4,46</b>	<b>5,34</b>	<b>5,60</b>	<b>-1,05</b>	<b>5,98</b>

Indeks implisit di Kota Dumai pada tahun 2021 sebesar 153,44 yang artinya bahwa terjadi kenaikan harga produsen barang dan jasa di Kota Dumai sebesar 53,44 persen terhadap harga produsen barang dan jasa pada tahun 2010. Selanjutnya laju indeks implisit pada tahun 2021 sebesar 3,90 persen yang menunjukkan bahwa terjadi kenaikan harga barang dan jasa di sisi produsen sebesar 3,90 persen terhadap harga barang dan jasa di sisi produsen tahun sebelumnya dimana sektor pertanian, kehutanan dan perikanan memberikan kontribusi terbanyak sebesar 6,55 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel. 6  
Indeks Harga Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di Kota Dumai (2010=100), 2017–2021

Lapangan Usaha/Industry (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	151,77	153,29	154,14	159,96	170,43
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	146,48	156,43	163,26	167,23	170,56
C Industri Pengolahan/ Manufacturing	131,27	137,16	143,11	145,04	152,10



PEMKO DUMAI

D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	156,75	157,52	165,96	161,64	160,83
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan D ur Ulang/Water Supply; Sewerage, 38 Waste Management, and Remediation Activities	128,83	131,02	134,75	136,43	136,43
F	Konstruksi/Construction	153,56	160,45	164,73	165,35	167,53
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	132,36	133,91	137,92	140,96	144,43
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	141,12	144,07	148,23	156,17	162,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	171,47	174,21	176,73	178,81	181,68
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	122,75	132,27	135,75	135,81	136,36
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	141,73	144,23	146,68	146,11	153,54
L	Real Estat/Real Estate Activities	144,13	148,31	148,87	148,59	148,63
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	145,43	147,95	153,12	155,84	154,89
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	128,32	131,52	132,85	136,35	136,90
P	Jasa Pendidikan/Education	158,66	159,43	165,11	170,36	172,34
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	155,54	156,56	163,71	167,85	169,65
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	152,54	156,13	160,59	165,23	166,91
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>135,79</b>	<b>140,52</b>	<b>145,42</b>	<b>147,68</b>	<b>153,44</b>

Tabel. 7  
Laju Implisit Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha di  
Kota Dumai (persen), 2017–2021

Lapangan Usaha/Industry (1)	2017 (2)	2018 (3)	2019 (4)	2020* (5)	2021** (6)
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	3,62	1,00	0,56	3,77	6,55
B Pertambangan dan Penggalian/Mining and	0,83	6,79	4,37	2,43	1,99



PEMKO DUMAI

	Quarrying					
C	Industri Pengolahan/ Manufacturing	4,68	4,49	4,34	1,35	4,87
D	Pengadaan Listrik dan Gas/ Electricity and Gas	9,36	0,49	5,36	-2,60	-0,50
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	5,57	1,70	2,84	1,25	-0,04
F	Konstruksi/Construction	4,33	4,49	2,67	0,38	1,32
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,11	1,18	2,99	2,20	2,46
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1,64	2,09	2,89	5,35	3,97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ Accommodation and Food	1,40	1,60	1,39	1,24	1,60
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	6,73	7,76	2,63	0,04	0,41
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	2,99	1,77	1,70	-0,39	5,09
L	Real Estat/Real Estate Activities	2,83	2,90	0,38	-0,19	0,03
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	0,02	1,73	3,49	1,78	-0,61
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,04	2,50	1,01	2,64	0,40
P	Jasa Pendidikan/Education	1,09	0,48	3,56	3,18	1,16
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	1,80	0,66	4,57	2,53	1,07
R,S, T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	2,59	2,35	2,85	2,89	1,02
	<b>Produk Domestik Bruto/Gross Domestic Product</b>	<b>3,88</b>	<b>3,48</b>	<b>3,49</b>	<b>1,55</b>	<b>3,90</b>



### **e. Pendapatan Per Kapita**

Pendapatan perkapita merupakan indikator terpenting yang menggambarkan perkembangan ekonomi wilayah. Sekaligus menunjukkan kinerja dan hasil pembangunan. Indikator berhasil tidaknya pembangunan ekonomi suatu wilayah dapat dilihat dari meningkatnya pendapatan regional. bahkan tinggi rendahnya pendapatan perkapita dapat digunakan sebagai determinasi kemajuan wilayah. Satu hal yang perlu diperhatikan bersama bahwa kemajuan wilayah tidak hanya ditentukan oleh besaran pendapatan regional. tapi juga tergantung dari banyaknya jumlah penduduk.

Oleh karena itu. salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dapat dilihat berdasarkan besarnya kenaikan pendapatan per kapita penduduk. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Konstan per kapita dapat digunakan untuk menunjukkan gambaran dari rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah serta dapat digunakan sebagai salah satu indikator kemakmuran. PDRB per kapita secara agregatif menunjukkan kemampuan penduduk suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi.

Fungsi penghitungan pendapatan per kapita adalah untuk mengetahui apakah suatu wilayah bisa disebut sejahtera atau tidak. Pengukuran pendapatan per kapita juga berguna dalam menilai keterjangkauan suatu daerah. Ini dapat digunakan bersamaan dengan data soal harga sandang. pangan dan papan. Pendapatan per kapita dapat membantu menentukan apakah terjangkau tidaknya harga sandang. pangan dan papan oleh rata-rata keluarga. Sandang (pakaian) bermakna keharusan menjaga perilaku yang beradab. Pangan (makanan) bermakna keharusan berusaha mewujudkan mimpi agar menjadi nyata. sedangkan Papan (tempat tinggal) bermakna keharusan mampu beradaptasi memberi makna dalam peranan kehidupan harian. Oleh karena itu menjaga rasio harga sandang. pangan dan papan rumah terhadap pendapatan per kapita sangat berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Selama periode tahun 2016-2021 PDRB per kapita Harga Berlaku dengan migas menunjukkan tren peningkatan dari Rp. 95.79 Juta per kapita pada tahun 2016 menjadi Rp. 123.66 juta per kapita pada tahun 2021 atau naik dengan pertumbuhan 5.34% per tahun. Sedangkan PDRB per kapita Harga Konstan mengalami peningkatan dari Rp. 73.28 juta per kapita pada tahun 2016 menjadi Rp. 80.59 juta per kapita pada tahun 2021 atau



dengan pertumbuhan 1.99% per tahun. Pada tabel berikut menyajikan perbandingan PDRB perkapita Kota Dumai dengan Provinsi Riau selama kurun waktu tahun 2016-2021.

Tabel 8

**Perkembangan PDRB Perkapita Kota Dumai dan PDRB Perkapita Provinsi Riau Tahun 2016-2021**

No	PDRB Per Kapita	Tahun					Rata-Rata Pertumbuhan /Tahun (%)	
		2016	2017	2018	2019	2020		2021
1	PDRB HB Per Kapita Kota Dumai	95,79	101,95	109,06	119,45	115,27	123,66	5,3%
2	PDRB HB Per Kapita Provinsi Riau	104,98	105,85	110,38	111,23	114,33	129,85	4,4%
3	PDRB HK Per Kapita Kota Dumai	73,28	75,07	77,61	82,14	78,05	80,60	2,0%
4	PDRB HK Per Kapita Provinsi Riau	70,55	70,74	70,74	72,59	76,88	77,99	2,0%

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2022)

Hasil analisis Tipologi Klasen untuk Kota Dumai pada tahun 2011. 2012 dan 2014 masuk dalam kategori wilayah relative tertinggal. sedangkan pada tahun 2013 masuk dalam kategori wilayah berkembang cepat. selanjutnya sejak tahun pada tahun 2016-2020 Kota Dumai mengalami perkembangan perekonomian wilayah yang sangat pesat sehingga masuk dalam kategori wilayah berkembang cepat tumbuh. Hal ini terjadi karena Kota Dumai memiliki pendapatan per kapita dan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dari pada pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau selama periode tahun 2016-2021. jelasnya sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.



Tabel. 9

**Perkembangan Ekonomi Wilayah Menurut Tipologi Klassen Kota Dumai Tahun 2016-2021**

No	Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB HK (r)	PDRB Perkapita (Y)	
		Yi > Y	Yi < Y
1	$r_i > r$	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh	Wilayah berkembang cepat
2	$r_i < r$	Wilayah maju tapi tertekan	Wilayah relatif tertinggal

Tahun	Indikator				Kategori
	r <sub>i</sub> : Laju Pertumbuhan PDRB HK Kota Dumai	r: Laju Pertumbuhan PDRB HK Provinsi Riau	Y <sub>i</sub> : PD RB AD HK per kapita Kota Dumai	Y: PDRB ADHK per kapita Provinsi Riau	
2016	4.14	-3.34	73.28	70.55	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2017	4.46	2.70	75.07	70.74	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2018	5.35	2.31	77.61	70.74	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2019	5.61	2.85	82.14	71.10	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2020	-1.04	-1.13	78.05	76.64	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh
2021	5.98	3.36	80.59	77.99	Wilayah cepat maju dan cepat tumbuh

(Sumber: Kota Dumai Dalam Angka, 2022)

Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Tingkat kesejahteraan suatu rumah tangga dapat dilihat melalui besarnya pendapatan yang diterima oleh rumah tangga yang bersangkutan (BPS, 2020). Akan tetapi data pendapatan yang akurat sulit diperoleh. Pendapatan perkapita masyarakat Kota Dumai diperkirakan akan mengalami perubahan seiring terjadinya perubahan nilai PDRB pada sektor-sektor dominan yang ada di Kota Dumai akibat masih mewabahnya Covid-19.

#### f. Ketimpangan Pendapatan (Ratio Gini)

Distribusi Pendapatan adalah ukuran yang mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu wilayah terhadap penduduknya. Distribusi pendapatan merupakan kriteria yang menunjukkan mengenai penyebaran pembagian pendapatan/kekayaan antar penduduk satu dengan penduduk lainnya dalam wilayah tertentu. Distribusi pendapatan yang tidak merata mengakibatkan munculnya kesenjangan pendapatan, yaitu perbedaan kemakmuran ekonomi antara kelompok penduduk kaya dengan yang miskin. Dalam artian. Penduduk pendapatan riil



dari kelompok kaya terus bertambah sedangkan yang miskin terus berkurang atau dengan kata lain pendapatan riil yang kaya tumbuh lebih cepat dari pada yang miskin.

Salah satu indikator untuk mengukur distribusi pendapatan adalah Indeks Gini. Dari hasil pengolahan data statistik kesejahteraan Riau pada tahun 2016-2021. Menggambarkan bahwa ketimpangan pendapatan kesenjangan pendapatan masyarakat Kota Dumai masuk pada kategori ketimpangan tinggi dan sedang:  $G > 0.5$  ketimpangan tinggi;  $0.35 < G < 0.5$  ketimpangan sedang;  $G < 0.35$  ketimpangan ringan.

Grafik 5  
Perkembangan Indeks Gini Kota Dumai dan Provinsi Riau  
Tahun 2016-2021



Sumber: Dumai Dalam Angka Tahun 2022, diolah

## 2. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Wajib dan Urusan Pilihan, pada Urusan Wajib dibagi atas Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib yang tidak terkat Pelayanan Dasar.

Urusan Wajib terkait Pelayanan Dasar meliputi :

1. pendidikan
2. kesehatan
3. pekerjaan umum dan penataan ruang
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman
5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan



PEMKO DUMAI

## 6. sosial

Dalam pengukuran capaian kinerja, Pemerintah Kota Dumai pada tahun 2022 berpedoman pada format Pengukuran Kinerja sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Dumai Tahun 2022.

Adapun tujuan dilakukannya pengukuran kinerja adalah dalam rangka untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Dumai sebagai alat ukur untuk melihat pencapaian Visi RPJMD Kota Dumai tahun 2021-2026 yaitu Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Unggul dan Bertumpu Pada Budaya Melayu (Dumai Kota Idaman).



## 1. Indikator Kinerja Kunci Keluaran

### a) Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Output	RUMUS	Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pendidikan	1	Jumlah Satuan pendidikan anak usia dini terakreditasi Negeri/swasta	<i>Sudah cukup jelas</i>	88	DISDIK	
		2	Jumlah peserta didik PAUD Negeri/swasta yg menerima pelengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		3	Jumlah peserta didik PAUD Negeri/swasta yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	282	DISDIK	
		4	Jumlah kebutuhan kebutuhan minimal pendidik PAUD Negeri/swasta	<i>sda</i>	-	DISDIK	
		5	Jumlah pendidik pada PAUD (Negeri/swasta)	<i>sda</i>	413	DISDIK	
		6	Jumlah pendidik PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah Diploma IV / S.1 bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan lain / psikologi dan sertifikat profesi guru pendidik anak usia dini	<i>sda</i>	61		
		7	Jumlah kepala sekolah PAUD (Negeri dan Swasta) yang memiliki jajah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah untuk PAUD formal atau sertifikat pendidikan dan pelatihan kepala satuan PAUD non formal dari lembaga pemerintah	<i>sda</i>	31	DISDIK	
		8	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<i>sda</i>	110	DISDIK	
		9	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>Sda</i>	-	DISDIK	
		10	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik	<i>sda</i>	-	DISDIK	



		dari Pemerintah Daerah			
	11	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	31.622	DISDIK
	12	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	10.469	DISDIK
	13	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK
	14	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK
	15	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	2.210	DISDIK
	16	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	881	DISDIK
	17	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK
	18	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	-	DISDIK
	19	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	508	DISDIK
	20	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	328	DISDIK
	21	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>D-IV/S1=2.165 SERTIFIKASI=1.055</i>	3220	DISDIK
	22	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>D-IV/S1=887 SERTIFIKASI=421</i>	1308	DISDIK
	23	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon	<i>D-IV/S1=98 SERTIFIKASI=73</i>	171	DISDIK



		kepala sekolah			
	24	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>D-IV/S1=36 SERTIFIKASI=33</i>	69	DISDIK
	25	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	139	DISDIK
	26	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	101	DISDIK
	27	Jumlah SD dan SMP Negeri Terakreditasi	<i>sda</i>	110	DISDIK
	28	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK
	29	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	-	DISDIK
	30	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah dasar yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	31.622	DISDIK
	31	Jumlah peserta didik pada jenjang sekolah menengah pertama yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	10.469	DISDIK
	32	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	-	DISDIK
	33	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	-	DISDIK
	34	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	2.210	DISDIK
	35	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	881	DISDIK
	36	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	-	DISDIK
	37	Jumlah kebutuhan minimal tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah	<i>sda</i>	-	DISDIK



PEMKO DUMAI

		pertama				
	38	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah dasar	<i>sda</i>	508	DISDIK	
	39	Jumlah tenaga kependidikan pada jenjang sekolah menengah pertama	<i>sda</i>	328	DISDIK	
	40	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	2.165	DISDIK	
	41	Jumlah pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	<i>sda</i>	887	DISDIK	
	42	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	98	DISDIK	
	43	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	36	DISDIK	
	44	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	139	DISDIK	
	45	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA/ sederajat	<i>sda</i>	101	DISDIK	
	46	Jumlah satuan pendidikan kesetaraan terakreditasi (Negeri dan swasta)	<i>sda</i>	11	DISDIK	
	47	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	<i>sda</i>	89	DISDIK	
	48	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang menerima pembebasan biaya pendidikan	<i>sda</i>	-	DISDIK	
	49	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada	<i>sda</i>	-	DISDIK	



PEMKO DUMAI

			satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)					
		50	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta)	<i>sda</i>	54	DISDIK		
		51	Jumlah pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1)	<i>sda</i>	42	DISDIK		
		52	Jumlah kepala sekolah pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah D-IV atau S1, sertifikat pendidik dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah	<i>sda</i>	98	DISDIK		
		53	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan (Negeri dan Swasta) yang memiliki ijazah D-IV atau S1	<i>sda</i>	6	DISDIK		
2	Kesehatan	1	Jumlah RS Rujukan kabupaten/kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	<i>sda</i>	4	RSUD		
		2	Jumlah RS dibina dan dipersiapkan akreditasinya	<i>sda</i>	2	RSUD		
		3	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9.392	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan antenatal	<i>sda</i>	591	Diskes	
		4	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8.965	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan persalinan sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	
		5	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8.538	Diskes	
			2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan neonatal esensial sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	
		6	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	35.456	Diskes	



PEMKO DUMAI

	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	<i>sda</i>	591	Diskes	
7	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	59.765	Diskes	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes	
8	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	204.974	Diskes	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk Pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes	
9	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	15.039	Diskes	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	646	Diskes	
10	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	71.064	Diskes	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	622	Diskes	
11	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	3.740	Diskes	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	622	Diskes	
12	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	493	Diskes	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	10	Diskes	
13	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	8.053	Diskes	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	<i>sda</i>	330	Diskes	
14	1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	9.965	Diskes	
	2	Jumlah SDM kesehatan untuk	<i>sda</i>	330	Diskes	



PEMKO DUMAI

				elayanan kesehatan sesuai standar				
3	PU dan PR	1	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (ha)	<i>sda</i>	844	PUPR	
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak ada kewenangan Kota
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten / Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak ada kewenangan Kota
			4	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi dan akresi di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	Tidak ada kewenangan Kota
			5	Rencana tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS kewenangan Kabupaten / Kota	<i>Ada/tidak</i>	-	PUPR	
			6	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan Kabupaten / Kota	<i>Ada/tidak</i>	-	PUPR	
			7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten / Kota	<i>Jumlah</i>	21	PUPR	
		2	1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten/Kota (ha)	<i>Sudah cukup jelas</i>	11,33%	PUPR	680/6000*100%
			2	Panjang sungai di kawasan permukiman yang rawan banjir di WS kewenangan Kabupaten / Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS Kabupaten/Kota (ha)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			4	Panjang pantai di kawasan permukiman yg rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan Kabupaten/Kota (m)	<i>sda</i>	-	PUPR	
			5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	
			6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	



PEMKO DUMAI

			sumber daya air kewenangan Kabupaten/Kota						
		7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah</i>	21		PUPR		
	3	1	Pemenuhan dokumen RISPAM lintas kabupaten/kota	<i>Ada/tdk</i>	1 Dok		PUPR		
		2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA Kabupaten/Kota	<i>Ada/tdk</i>	Tidak		PUPR		
		3	Jumlah BUMD dan atau UPTD Kabupaten/Kota penyelenggaraan SPAM	<i>Sudah cukup jelas</i>	1		PUPR		
		4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	<i>Sda</i>	1		PUPR		
		5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya	<i>Sda</i>	2		PUPR		
	4	1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	<i>Sda</i>	1264		PUPR		
		2	Jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD-T	<i>Sda</i>	450		PUPR		
		3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	<i>Sda</i>	1714		PUPR		
		4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Sda</i>	-		PUPR		data ada di Dinkes
		5	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	<i>Sda</i>	-		PUPR		
		6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	<i>Sda</i>	300.260		PUPR		
		7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	$\Sigma$ Rumah yg memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki seftik		92,83		PUPR	



PEMKO DUMAI

				Rumah diwilayah pengembangan spald dg kepadatan penduduk pada wilayah terbangun <25 $\frac{\sum}{\text{X } 100 \%}$				
		8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yg lumpur tinjanya yg telah diolah di IPLT}}{\text{Rumahdiwilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pd wilayah terbangun } > 25 \frac{\sum \text{ Jiwa/ha}}{\text{X } 100 \%}}$		-	PUPR	
		9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD}}{\sum \text{rumah diwilayah pengembangan SPALDT sda} \times 100\%}$		-	PUPR	
		10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	$\frac{\sum \text{rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat}}{\sum \text{jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S}} \times 100\%$		-	PUPR	
		11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	$\frac{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang tersedia}}{\sum \text{jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kab/kota}} \times 100\%$		2	PUPR	



PEMKO DUMAI

	12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia x100%		1 Unit kapasitas 10 m3/hari	PUPR	
			$\Sigma$ jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab/kota				
	13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	$\Sigma$ jumlah rumah yangmemilikisambuungan rumah yangtersambungdenganIPA LD x100%		450 rumah	PUPR	
			jumlah rumah yangdilayani $\Sigma$ dengan SPALD-T pada kab/kota				
	14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	$\Sigma$ jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot x100%		-	PUPR	data ada di Dinkes
			$\Sigma$ jumlah rumah yang termasukdalam wilayah pengembangan SPADLD-S				
6	1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang layak fungsi	Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsiyangberlaku		-	PUPR	
			Jumlah bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana)				
	2	Jumlah IMB yang diberikan oleh Pemerintah Kab/Kota dalam tahun eksisting	<i>Sudah cukup jelas</i>		-	PUPR	data ada di DPMPTS



PEMKO DUMAI

						P
	3	Penetapan Peraturan Daerah tentang Bangunan/Gedung	<i>Ada/tdk</i>	Perda no 1 tahun 2016 tentang bangunan gedung	PUPR	
	4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	<i>Ada/tdk</i>	Tim Pengkaji Ahli (TPA)	PUPR	
	5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	<i>Sudah cukup jelas</i>	-	PUPR	
	6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	<i>sda</i>	-	PUPR	
	7	Jumlah bangunan gedung negara milik Pemerintah Kab/Kota	<i>sda</i>	6	PUPR	
	8	Jumlah bangunan gedung negara milik pemerintah kabupaten/ kota yang dipelihara/dirawat	<i>sda</i>	3	PUPR	
7	1	Panjang jalan berdasarkan SK Kepala Daerah tentang panjang jalan kewenangan Kab/Kota	<i>Sudah cukup jelas</i>	1198.243 KM	PUPR	
	2	Dokumen rencana induk pengembangan jaringan jalan kota		-		
	3	Panjang jalan yang dibangun	<i>Sudah cukup jelas</i>	24 KM	PUPR	
	4	Panjang jembatan yang dibangun	<i>sda</i>	18 Unit	PUPR	
	5	Panjang jalan yang ditingkatkan (struktur/fungsi)	<i>sda</i>	0	PUPR	
	6	Panjang jembatan yang diganti/dilebarkan	<i>sda</i>	0	PUPR	
	7	Panjang jalan yang direkonstruksi atau direhabilitasi	<i>sda</i>	0	PUPR	
	8	Panjang jembatan yang direhabilitasi	<i>sda</i>	55	PUPR	
	9	Panjang jalan yang dipelihara	<i>sda</i>	0	PUPR	
	10	Panjang jembatan yang dipelihara	<i>sda</i>	-	PUPR	
8	1	Jumlah pelatihan tenaga operator/teknis/analisis di wilayah Kab/Kota	<i>Sudah cukup jelas</i>	-	PUPR	



PEMKO DUMAI

		2	Jumlah tenaga kerja operator/teknis/analisis yang terlatih di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		3	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih yang tersertifikasi operator/teknis/analisis di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		4	Terselenggaranya Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi cakupan Kab/Kota yang aktif dengan data termutakhir	<i>Ada/tdk</i>	-	PUPR	
		5	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah provinsi yang bersumber dari APBD Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		6	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari APBN	<i>sda</i>	-	PUPR	
		7	Tersedianya data dan informasi potensi pasar jasa konstruksi di wilayah kabupaten/kota untuk tahun berjalan yang bersumber dari pendanaan lainnya	<i>sda</i>	-	PUPR	
		8	Tersedianya data dan informasi paket pekerjaan jasa konstruksi sesuai kewenangannya yang sudah dan sedang dilaksanakan oleh badan usaha jasa konstruksi yang termutakhir secara berkala	<i>sda</i>		PUPR	
		9	Tersedianya data dan profil OPD sub-urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR	
		10	Tersedianya data dan informasi pelatihan tenaga operator dan teknisi/analisis konstruksi di wilayah kabuapten/kota yang dilaksanakan sendiri atau melalui kerjasama dengan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja (LPPK) yang diregistrasi oleh menteri yang membidangi jasa konstruksi, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan instansi pemerintah lainnya.	<i>sda</i>	-	PUPR	
		11	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja	<i>sda</i>	-	PUPR	



PEMKO DUMAI

			konstruksi yang terlatih di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknisi/analis			
		12	Tersedianya data dan informasi tenaga kerja konstruksi terlatih yang tersertifikasi operator/teknisi/analis di wilayah kab/kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		13	Tersedianya data dan informasi badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		14	Tersedianya data dan informasi pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	<i>sda</i>	-	PUPR
		15	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikas usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR
		16	Tersedianya data dan informasi kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR
		17	Tersedianya data dan informasi hasil pengawasan ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR
		18	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN di wilayah kab/kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		19	Jumlah usaha perseorangan yang memiliki TDUP di wilayah kabupaten/kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		20	Jumlah badan usaha yang memiliki IUJKN yang terlibat dalam proyek di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR
		21	Jumlah badan usaha yang mendapatkan pembinaan di wilayah Kab/Kota	<i>sda</i>	-	PUPR



PEMKO DUMAI

			22	Jumlah pemenuhan komitmen permohonan IUJK badan usaha dan TDUP yang disetujui	<i>sda</i>	-	PUPR	
			23	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan kegiatan usaha jasa konstruksi yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>		PUPR	
			24	Jumlah kecelakaan konstruksi pada proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya	<i>sda</i>	-	PUPR	
			25	Jumlah pengawasan terkait ketidaksesuaian jenis, sifat, klasifikasi, layanan usaha, bentuk dan/atau kualifikasi usaha dengan segmentasi pasar jasa konstruksi yang	<i>sda</i> -	-	PUPR	
4	Perumahan Rakyat	1	1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	<i>Sudah cukup jelas sda</i>	429	Perkimtan	tidak terjadi bencana alam
			2	Jumlah rumah yang terkena bencana alam	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			3	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban yang rumahnya terkena bencana alam		0	Perkimtan	
			4	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang direhabilitasi	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			5	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			6	Jumlah unit rumah korban bencana alam yang dibangun baru/direlokasi sesuai dengan rencana aksi	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara bagi korban bencana	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			8	Jumlah RT, KK, dan Jiwa korban bencana yang terfasilitasi	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
			9	Jumlah, luasan dan lokasi percadangan lahan	<i>sda</i>	0	Perkimtan	
		2	1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	<i>Sudah cukup jelas</i>	0	Perkimtan	
		2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan	<i>sda</i>	0	Perkimtan		



PEMKO DUMAI

			layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM			
		3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	Perkimtan
		4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	sda	0	Perkimtan
		5	Jumlahrumahtangga penerimalayanan yang belummendapatkan penyediaanrumahlayak huniberdasarkanrencana pemenuhan SPM	sda	0	Perkimtan
		6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaantanah	sda	0 Ha	Perkimtan
	3	1	Jumlah luasan (ha) kawasan permukiman kumuh $\geq$ 10-15 Ha	Sudahcukupjelas	12.98 Ha	Perkimtan
		2	Jumlah unit peningkatan kualitas RTLH	sda	248	Perkimtan
		3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	sda	24.85 Ha	Perkimtan
	4	1	Jumlahrumah di kab/kota	Sudahcukupjelas	48.888	Perkimtan
		2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	sda	248	Perkimtan
		3	Jumlahrumahtidak layakhuni	sda	9.739	Perkimtan
		4	Jumlahrumah yang tidakdihuni	sda	-	Perkimtan
		5	Rasiorumah dan KK	<i>Jumlah KK</i> <i>Jumlah total unit rumah x 100%</i>	<u>70.537</u> 40.888 x 100% = 1.4%	Perkimtan



PEMKO DUMAI

		6	Jumlah rumah pembangunan baru	<i>sda</i>	386	Perkimtan	
		5	1 Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	<i>Sudah cukup jelas</i>	59	Perkimtan	
		2	Jumlah unit rumah yang sudah difasilitasi air minum	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		4	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses sanitasi (on site / off site)	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		6	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi akses PJU	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
		9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	<i>sda</i>	-	Perkimtan	
<b>5</b>	Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1	1 Jumlah pelanggaran dan pengaduan trantibum dalam kabupaten/kota yang ditangani	<i>Sudah cukup jelas</i>	1164	SATPOL PP	
			2 Jumlah satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan	<i>sda</i>	0	SATPOL PP	
			3 Jumlah sarana dan prasarana minimal yang dipenuhi	<i>sda</i>	5	SATPOL PP	
			4 Jumlah Perda dan Perkada yang ditegakkan	<i>sda</i>	21	SATPOL PP	
			5 Jumlah Pol PP yang memiliki kualitas sebagai PPNS	<i>Ada/tdk</i>	3	SATPOL PP	
			6 Jumlah SOP dalam penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan Trantibum	<i>sda</i>	6	SATPOL PP	



PEMKO DUMAI

	2	1	Persentase penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <hr/> <p>Jumlah satu dokumen KRB yang lengkap dan sudah disahkan</p>	<p><u>0</u></p> <p>0</p>	0%	BPBD	
		2	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	<p>Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana</p> <hr/> <p>Seluruh penduduk di kawasan rawanr bencana sesuai jenis ancamanbencana</p>	<p><u>234.520</u></p> <p>234.520</p>	100%	BPBD	
	3	1	Persentase penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen yangd isusun</p> <hr/> <p>Jumlah satu dokumen RPB yang lengkap dan sudah disahkan</p>	<p><u>0</u></p> <p>0</p>	0%	BPBD	
		2	Persentase penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	<p>Kemajuan pekerjaan dokumen yang disusun</p> <hr/> <p>Jumlah satu dokumen renkon yang lengkap dan sudah disahkan</p>	<p><u>0</u></p> <p>0</p>	0%	BPBD	
	3	3	Persentase jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan	<p>Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan</p> <hr/> <p>Jumlah aparatur dengan warga negara di kawasan rawan bencana</p>	<p><u>217</u></p> <p>234.520</p>	0.0009%	BPBD	
		4	Persentase warga negara yang ikut pelatihan	<p>Jumlah warga negara yang ikut pelatihan</p> <hr/> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	<p><u>127</u></p> <p>234.520</p>	0.0005%	BPBD	
		5	Persentase warga negara yang mendapatkan layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	<p>Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops</p> <hr/> <p>Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana</p>	<p><u>234.520</u></p> <p>234.520</p>	100%	BPBD	



PEMKO DUMAI

		6	Persentase warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	jumlahwarga negara yang mendapat layanan peralatan perlindungan Jumlah warga negara yang berada di kawasan rawan bencana	$\frac{234.520}{234.520}$	100%	BPBD	
	4	1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB Jumlah seluruh penetapan status KLB	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
		2	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
		3	Persentase jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	Jumlah petugass aktif dalam penanganan darurat bencana Jumlah keseluruhan petugas dalam penanganan darurat bencana	$\frac{273}{273}$	100%	BPBD	
		4	Persentase jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	jumlah korban yang berhasil di cari, ditolong dan dievakuasi Perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana	$\frac{0}{0}$	0%	BPBD	
	5	1	Jumlah dan jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota	Sudah cukup jelas		141	BPBD	
		2	Tersedianya pos sektor damkar yang dilengkapi sarana prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan di kantor kecamatan	Ada/tidak		Tidak	BPBD	



PEMKO DUMAI

		3	Tersedianya aparatur selama 24 (jam) yang dilaksanakan secara bergantian (shift) di kantor kecamatan	Dibuat dalam bentuk daftar	0	BPBD	
		4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	Dibuat dalam bentuk daftar	0	BPBD	
		5	Jumlah dan jenis sarana prasarana pemadaman, penyelamatan dan evakuasi	<i>Sudah cukup jelas</i>	225	BPBD	
		6	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memenuhi Standar Kualifikasi Pemadam sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran	<i>Sudah cukup jelas</i>	36	BPBD	
		7	Jumlah relawan kebakaran di bawah binaan Dimas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan kebakaran	<i>Sudah cukup jelas</i>	127	BPBD	
		8	Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran	Sudah cukup jelas	36	BPBD	
6	Sosial	1	1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	Sudah cukup jelas	1.860	DINAS SOSIAL
			2	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang masuk dalam data terpadu FM dan OTM	<i>sda</i>	898	DINAS SOSIAL
			3	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL
			4	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dijangkau	<i>sda</i>	1.860	DINAS SOSIAL
			5	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL
			6	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket pemakaman sesuai standar gizi	<i>sda</i>	132	DINAS SOSIAL



PEMKO DUMAI

		7	Jumlah rumah singgah/shelter/tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar	<i>sda</i>	1	DINAS SOSIAL	
		8	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang	<i>sda</i>	132	DINAS SOSIAL	
		9	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		10	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		11	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		12	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		13	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		14	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan	<i>sda</i>	6	DINAS SOSIAL	
		15	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah singgah/shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial	<i>sda</i>	132	DINAS SOSIAL	
	2	16	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan kepada keluarga dan masyarakat	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		17	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan	<i>sda</i>	1	DINAS SOSIAL	
		18	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan Kesehatan dasar	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	



PEMKO DUMAI

		19	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga	<i>sda</i>	132	DINAS SOSIAL	
		20	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga	<i>sda</i>	132	DINAS SOSIAL	
		21	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk	<i>sda</i>	105	DINAS SOSIAL	
	3	1	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan	<i>sda</i>	267	DINAS SOSIAL	
		2	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang	<i>sda</i>	267	DINAS SOSIAL	
		3	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		4	Jumlah paket permakanan khusus bagi kelompok rentan	<i>sda</i>	0	DINAS SOSIAL	
		5	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial	<i>Ada/tidak</i>	0	DINAS SOSIAL	
		6	Jumlah pekerja sosial profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia	<i>sda</i>	132	DINAS SOSIAL	



PEMKO DUMAI

b. Indikator Kinerja Kunci Hasil (outcome)

No	Urusan Pemerintahan	No	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	RUMUS		Capain Kinerja	Sumber Data	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pendidikan	1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5 - 6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disatuan PAUD}}{\text{Jumlah anak usia 5-6 tahun pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	(4.342/13.307) x 100%	32,62%	DISDIK	
		2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7 - 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan Dasar	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah dasar}}{\text{Jumlah anak usia 7-12 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(35.544/41.543) x 100%	85,56%	DISDIK	
		3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	$\frac{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar disekolah menengah pertama}}{\text{Jumlah anak usia 13-15 tahun pada provinsi yang bersangkutan}} \times 100\%$	(11.486/20.551) x 100%	55,89%	DISDIK	
		4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	$\frac{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan}}{\text{Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada kota yang bersangkutan}} \times 100\%$	(606/606) x 100%	100%	DISDIK	
		5	Terlestarikannya Cagar Budaya	$\frac{\text{Jumlah cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah cagar budaya yang terdata}} \times 100\%$	(24/24) x 100%	100%	DISDIK	



PEMKO DUMAI

2	Kesehatan	1	Rasio daya tampung rumah sakit	$\frac{\text{Jumlah daya tampung rumah sakit rujukan}}{\text{Jumlah Penduduk di kabupaten/kota}}$	$\frac{343}{335.303}$	0,001 %	RSUD	
		2	Persentase RS rujukan tingkat kab/kota yang terakreditasi	$\frac{\text{Jumlah RS Rujukan yang terakreditasi}}{\text{Jumlah RS di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{2}{4}$	50 %	RSUD	
		3	persentase ibu hamil mendapat pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan}}{\text{Jumlah ibu hamil di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{(8498 / 9392)}{100} \times 100$	90,48 %	DISKES	
		4	persentase ibu bersalin mendapat pelayanan persalinan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan}}{\text{Jumlah ibu bersalin di kabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{(8101 / 8965)}{100} \times 100$	90,36 %	DISKES	
		5	persentasi bayi baru lahir mendapat pelayanan kesehatan bayi baru lahir	$\frac{\text{Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah bayi baru lahir dikabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{(7918 / 8538)}{100} \times 100$	92,74%	DISKES	
		6	Persentase balita mendapat pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah balita dikabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{(31460 / 35465)}{100} \times 100$	88,71 %	DISKES	
		7	persentase anak usia pendidikan dasar mendapat pelayanan kesehatan	$\frac{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah anak usia pendidikan dasar dikabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{(51785 / 59765)}{100} \times 100$	86,65%	DISKES	
		8	persentase orang usia 15-59 tahun mendapat skining kesehatan	$\frac{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah orang usia 15-59 tahun dikabupaten/kota}} \times 100\%$	$\frac{(167598 / 204974)}{100} \times 100$	81,77%	DISKES	
		9	persentase warga negara usia 60 tahun keatas mendapat skining kesehatan	$\frac{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas yang mendapatkan skining kesehatan sesuai standar}}{\text{Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas}} \times 100\%$	$\frac{(12924 / 15039)}{100} \times 100$	85,94%	DISKES	



				<i>Jumlah warga negara usia 60 tahun keatas dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
		10	persentase penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan	<i>Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	(33349 / 71064) $\times 100$	46,93 %	DISKES	
				<i>Jumlah penderita hipertensi dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
		11	persentase penderita DM mendapatkan pelayanan kesehatan	<i>Jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	(3540 / 3740) $\times$ 100	94,65 %	DISKES	
				<i>Jumlah penderita DM dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
		12	persentase ODGJ berat mendapatkkan pelayanan kesehatan jiwa	<i>Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	(481/ 493) $\times$ 100	97,57 %	DISKES	
				<i>Jumlah penderita ODGJ dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
		13	persentase orang yang terduga TBC mendapatkan pelayanan kesehatan TBC	<i>Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar</i>	(11605 / 8053) $\times 100$	144,11 %	DISKES	
				<i>Jumlah penderita TBC dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
		14	persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV	<i>Jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar</i>	(7907 / 9965) $\times$ 100	79,35%	DISKES	
				<i>Jumlah orang dengan resiko erinfeksi HIV dikabupaten/kota</i> $\times 100\%$				
3	PU dan PR	15	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i>		0	Dinas PUPR	Kota Tidak memiliki kewenangan atas WS
				<i>Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS Kewenangan Kab/Kota (ha)</i> $\times 100$				



PEMKO DUMAI

	16	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS kewenangan Kab/Kota	<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kabupaten/Kota (ha)</i>		0	Dinas PUPR	Kota Tidak memiliki kewenangan Pengamanan Pantai
			<i>Luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi di WS Kewenangan kabupaten/kota (ha) x 10</i>				
	17	Rasio luas daerah irigasi kewenangan Kab/Kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	<i>Luas irigasi kewenangan kab kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasikan dan pelihara (ha)</i>		0	Dinas PUPR	
			<i>luas daerah irigasi kewenangan kabupaten kota x 100%</i>				
	10	persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	<i>Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota</i>	<u>83.898</u> 97.423	86.12%	Dinas PUPR	
<i>Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh kabupaten/kota tersebut x 100%</i>							
11	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	<i>Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD</i>		0	Dinas PUPR		
		<i>Jumlah rumah di Kabupaten Kota x 100%</i>					
12	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	<i>Jumlah pemanfaatan IMB yang sesuai peruntukannya</i>	<u>165</u> 165	100%	Dinas PUPR		
		<i>Jumlah IMB yang berlaku x 100%</i>					



PEMKO DUMAI

		13	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	<i>Panjang jalan kewenangan provinsi yang mantap</i>	<u>772.883</u> 1.198.243	64.5%	Dinas PUPR	
				<i>Panjang jalan keseluruhan di wilayah kabupaten/kota x 100%</i>				
		14	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	<i>Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kab kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis</i>		65	Dinas PUPR	
				<i>Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten/Kota</i>				
		15	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	<i>Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi</i>	<u>375</u> 375	100	Dinas PUPR	
				<i>Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya x100%</i>				
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	14	Peyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	<i>Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n</i>	<u>0</u> 0	0	Dinas Perkim	
				<i>Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun n x 100%</i>				
		15	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi progam pemerintah kabupaten/kota	<i>Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni</i>	<u>0</u> 0	0	Dinas Perkim	
				<i>Jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan x 100%</i>				
16	Persentasi kawasan kumuh 10 – 15 Ha di kab/kota yang ditangani	<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani (ha)</i>	<u>24.85</u> 41.53	59.18%	Dinas Perkim			
		<i>Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha x 100%</i>						
17	Berkurangnya jumlah unit RTLH	<i>Jumlah unit rumah tidak layak huni</i>	<u>9.739</u>	19,92%	Dinas			



PEMKO DUMAI

				<i>Jumlah total unit rumah kabupaten/kota x 100%</i>	48.888		Perkim	
		18	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	<i>Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU</i>	<u>0</u> 48.888	0	Dinas Perkim	
				<i>Jumlah unit rumah kab/kota x 100%</i>				
5	Trantibum dan Linmas	18	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang ditangani}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	<u>37</u> 37	100%	Satpol PP	
		19	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada Pergub yang memuat sanksi}} \times 100\%$	<u>21</u> 68	30,88%	Satpol PP	
		20	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	Sudah jelas		234.520	BPBD	
		21	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Sudah jelas		234.520	BPBD	
		22	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Sudah jelas		234.500	BPBD	
		23	Persentase jangkauan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	<i>Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kabupaten kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah + jumlah layanan pemadaman di kab kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan atau Perangkat Daerah</i>	<u>35</u> 44	79.55%	BPBD	



PEMKO DUMAI

				<i>Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota x 100%</i> Sudah jelas				
		24	Waktu tanggap (respon time) penanganan kebakaran			15 Menit	BPBD	
6	Sosial	23	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	<i>Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti</i>	1.860/1.860 x 100%	100%	DINAS SOSIAL	
				<i>Populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis x 100%</i>				
		24	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	<i>Jumlah korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya dalam satu tahun anggaran</i>	267/267 x 100%	100%	DINAS SOSIAL	
				<i>Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah kabupaten kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten kota x 100%</i>				



### **3. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya.**

Hasil evaluasi dari tim evaluasi BPKP Propinsi Riau, diperoleh dari penilaian indeks capaian kinerja dan indeks kesesuaian materi, Pemerintah Kota Dumai memperoleh skor 3.0291 dengan status kinerja berprestasi **Sangat Tinggi** dan mendapatkan peringkat ke **5 (lima)** dari 12 Kabupaten/Kota se Propinsi Riau pada tahun 2019, dan untuk tingkat Nasional memperoleh predikat dengan skor 2,9541 dan **status kinerja tinggi**. sedangkan untuk tahun 2021 masih menunggu hasil dari tim evaluasi Propinsi Riau dan Menteri Dalam Negeri.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun 2021 April 2022 Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Propinsi Riau (BPK-RI) mengeluarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2021 Opini atas laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai tahun 2021 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

### **4. Realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran Daerah**

#### **a. Target Dan Realisasi Pendapatan**

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, ditargetkan sebesar Rp 1.392.335.943.486,00,- dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 452.558.659.244,67,-
- Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 939.777.284.241,33,-



*Tabel 10.* Target Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022  
Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2022 dan Perwako No. 80 Tahun 2022

NO.	URAIAN	TARGET APBD
1	2	3
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>452.558.659.244,67</b>
	Pajak Daerah	222.013.986.230,00
	Retribusi Daerah	47.985.440.000,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.663.748.323,67
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	180.895.484.691,00
<b>B.</b>	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>939.777.284.241,33</b>
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.763.838.753,00
	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.013.445.488,33
	<b>Jumlah .....</b>	<b>1.392.335.943.486,00</b>

Sumber Data Badan Pendapatan Daerah 2022

Adapun rincian Target dan Realisasi Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022 adalah dengan komposisi sebagai berikut :

*Tabel 11.* Target dan Realisasi Pendapatan  
Kota Dumai Tahun 2022

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1.392.335.943.486,00</b>	<b>1.370.198.448.465,86</b>	<b>98,41%</b>
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>452.558.659.244,67</b>	<b>464.003.743.318,86</b>	<b>102,53%</b>
<b>A</b>	<b>HASIL PAJAK DAERAH</b>	<b>222.013.986,230,00</b>	<b>226.332.093.315,36</b>	<b>101,94%</b>
<b>B</b>	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>47.985.440.000,00</b>	<b>32.206.368.295,17</b>	<b>67,12%</b>
<b>A</b>	<b>PAJAK DAERAH</b>	<b>222.013.986,230,00</b>	<b>226.332.093.315,36</b>	<b>101,94%</b>
-	Pajak Hotel	4.550.000.000,00	5.074.791.223,00	111,53%
-	Pajak Restoran	10.000.000.000,00	11.356.465.806,00	113,53%
-	Pajak Hiburan	1.800.000.000,00	1.964.400.861,00	109,13%
-	Pajak Reklame	2.900.000.000,00	2.948.451.655,00	101,67%
-	Pajak Penerangan Jalan	51.000.000.000,00	53.107.445.718,36	104,13%
-	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.204.938.824,00	109,54%
-	Pajak Parkir	600.000.000,00	762.420.003,00	127,07%
-	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.204.938.824,00	109,54%
-	Pajak Sarang Burung Walet	92.000.000,00	99.458.4754,00	108,11%
-	PBB	130.971.986.230,00	134.826.570.198,00	102,949%
-	BPHTB	19.000.000.000,00	14.987.150.552,00	78,88%



No.	URAIAN	TARGET APBD P 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
<b>B</b>	<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>47.985.440.000,00</b>	<b>32.206.368.295,17</b>	<b>67,12%</b>
-	Retribusi Jasa Umum	4.579.475.000,00	2.494.026.850,00	54,46%
-	Retribusi Jasa Usaha	28.403.965.000,00	23.468.411.300,00	82,62%
-	Ret. Perizinan Tertentu	15.002.000.000,00	6.243.930.145,17	41,62%
<b>C</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan</b>	<b>1.663.748.323,67</b>	<b>1.079.761.191,00</b>	<b>64,90%</b>
-	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD (Lembaga keuangan)	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90%
-	Bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD (aneka usaha)	0	1.079.761.191,00	0%
<b>D</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah</b>	<b>180.095.484.691,00</b>	<b>204.385.520.517,33</b>	<b>112,99%</b>
-	Hasil Penjualan BMD yang tidak dipisahkan	3.049.424.600,00	1.107.157.800,00	36,31%
-	Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan	801.206.585,00	853.733.335,00	106,56%
-	Hasil Kerjasama daerah	1.000.000.000,00	1.999.999.999,00	200%
-	Jasa Giro	2.750.000.000,00	3.540.712.219,01	128,75%
-	Pendapatan Bunga	3.100.000.000,00	793.646.059,95	87,33%
-	Penerimaan Komisi, potongan atau bentuk lain	4.988.896.330,00	6.898.667.314,88	25,60%
-	Pendapatan denda pajak daerah	1.175.758.877,00	1.869.969.8233,00	159,04%
-	Pendapatan dari pengembalian	32.560.678,00	154.945.024,84	475,87%
-	Pendapatan BLUD	168.986.533.951,00	192.479.014.394,14	113,90%
<b>II.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>939.779.284.241,33</b>	<b>906.194.705.147,00</b>	<b>96,43%</b>
<b>A.</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>794.763.838.753,00</b>	<b>778.721.000.729,00</b>	<b>97,98%</b>
<b>B.</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>145.013.445.488,33</b>	<b>127.473.704.418,00</b>	<b>87,90%</b>
	<b>Total Pendapatan .....</b>	<b>1.392.335.943.486,00</b>	<b>1.370.198.448.465,86</b>	<b>98,41%</b>

Sumber: Data Hasil Rekonsiliasi Realisasi Pendapatan Daerah Kota Dumai Tahun 2022 (Un Audited BPK RI)

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, rinciannya adalah sebagai berikut :



## 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD Kota Dumai pada Tahun Anggaran 2022 Perubahan ditargetkan sebesar Rp 452.558.659.244,67- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 464.003.743.318,86- atau 102,53% dari target semula. Adapun rincian PAD adalah sebagai berikut :

### a. Pajak Daerah

Pendapatan dari sektor Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp. 222.013.986.230,00- terealisasi sebesar Rp 226.332.093.315,00- atau 101,94% dari target semula. Rincian dari pencapaian penerimaan Pajak Daerah, adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel ditargetkan sebesar Rp 4.550.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 5.074.791.223,00- atau 111,53% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah adanya penambahan objek Pajak Hotel yang baru dan tingkat penerimaan omset hotel meningkat.
2. Pajak Restoran ditargetkan sebesar Rp 10.000.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 11.356.465.806,00- atau 113,56% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini karena adanya obyek Pajak Restoran yang baru, dan tingkat penerimaan omset restoran meningkat.
3. Pajak Hiburan ditargetkan sebesar Rp 1.800.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 1.964.400.861,00- atau 109,13% dari target semula. Faktor tercapainya target penerimaan ini karena naiknya penerimaan omset Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame ditargetkan sebesar Rp 2.900.000.000,00,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.948.451.655,00- atau 101,67% dari target semula, hal ini disebabkan meningkatnya tingkat pemasangan reklame/iklan pelaku usaha.



5. Pajak Penerangan Jalan Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 51.000.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 53.107.445.718,36- atau 104,13% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan ini adalah dikarenakan meningkatnya daya pemakaian listrik oleh masyarakat dan perusahaan yang beralih ke tenaga listrik PLN.
6. Pajak Parkir ditargetkan sebesar Rp. 600.000.000,00- dan realisasi sebesar Rp. 762.420.003,00- atau 127,07 % dari target semula.
7. Pajak Air Tanah ditargetkan sebesar Rp 1.100.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 1.204.9383824,00- atau 109,54% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan air tanah ini disebabkan meningkatnya data wajib pajak air tanah.
8. Pajak Sarang Burung Walet ditargetkan sebesar Rp 92.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 99.458.475,00- atau 108,11% dari target semula.
9. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pedesaan dan Perkotaan ditargetkan sebesar Rp 130.971.986.230,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 134.826.570.198,00- atau 102,94% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tercapainya target penerimaan adalah karena adanya pemutakhiran data PBB yang dilakukan pada Kegiatan Penilaian Individual Objek Pajak Non Standar dan adanya kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB P2.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ditargetkan sebesar Rp 19.000.000.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 14.987.150.552,00- atau 78,88% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan adalah karena terjadi penurunan transaksi jual beli tanah di Tahun 2022 dan sertifikasi akta tanah dari wajib pajak.



b. Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 47.985.440.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 32.206.368.295,17- atau 67,12% dari target semula. Adapun rincian lebih lanjut mengenai realisasi Pendapatan dari sektor Retribusi Daerah ini adalah sebagai berikut :

1. Retribusi Jasa Umum ditargetkan sebesar Rp 4.579.475.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 2.484.026.850,00- atau 54,46%. Adapun faktor yang mempengaruhi tidak tercapai target adalah sebagai berikut:
  - a) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 717.640.000,00- atau 95,69% dari target semula.
  - b) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ditargetkan sebesar Rp 1.000.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 427.750.000,00,- atau 42,78% dari target semula. Faktor yang mempengaruhi tidak tercapainya target penerimaan ini adalah:  
Belum optimalnya pelaksanaan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2012 tentang Pajak Parkir.
  - c) Retribusi Pelayanan Pasar ditargetkan sebesar Rp. 750.000.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 393.516.000,00- atau 52,47% dari target semula.
  - d) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor ditargetkan sebesar Rp. 829.475.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 178.702.750,00- atau 21,54% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan adalah disebabkan:
    - Masyarakat luas belum memiliki kesadaran untuk melakukan uji emisi kendaraan penumpang yang tidak dijasakan dan sepeda motor.



- Tingkat kesadaran pemilik kendaraan masih rendah untuk memperbaiki kondisi kendaraan sehingga benar-benar layak jalan, maka banyak kendaraan yang tidak lulus Uji KIR.
  - Dinas Perhubungan dan SAMSAT Kota Dumai belum mempunyai kerjasama yang kongkrit, seperti penundaan perpanjangan STNK apabila wajib pajak belum melakukan Uji Emisi Gas Buang Kendaraannya.
  - Belum adanya sanksi hukum atau penindakan hukum di jalan tentang Perda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Khususnya Uji Emisi Gas Buang Kendaraan yang tidak dijasakan.
  - Kondisi Peralatan Uji yang tidak baik, sehingga menyulitkan untuk melakukan implementasi Emisi Gas Buang Kendaraan dengan cara jemput bola ke pemilik kendaraan.
- e) Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang Metrologi ditargetkan sebesar Rp 250.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 251.221.000,00- atau 100,49% dari target semula.
- f) Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi ditargetkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 525.197.100,00- atau 52,52% dari target semula
2. Retribusi Jasa Usaha ditargetkan sebesar Rp. 28.403.965.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 23.468.411.300,00,- atau 82,62%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:
- a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah ditargetkan sebesar Rp. 135.000.000,00- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp. 157.000.000,00- atau 116,30%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah sebagai berikut:
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dari Alat dengan realisasi pencapaian tahun 2022 sebesar Rp 157.000.000,00-



- b) Retribusi Terminal ditargetkan sebesar Rp 74.722.500,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 141.688.000,00- atau 189,62% dari target semula. Retribusi Terminal ini meliputi:
- Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha target sebesar Rp 74.722.500,00,- dan realisasi sebesar Rp 141.688.000,00- atau 189,62%.
- c) Retribusi Tempat Khusus Parkir ditargetkan sebesar Rp 27.808.802.500,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 22.971.389.300,00- atau 82,60% dari target semula. Faktor penghambat tidak tercapainya target penerimaan ini disebabkan karena:
- Belum tercapainya target dari Retribusi Jasa Usaha Tempat Khusus Parkir, karena tempat khusus parkir RSUD Kota Dumai, Ramayana, Bukit Gelanggang, belum mencapai target.
- d) Retribusi Rumah Potong Hewan ditargetkan sebesar Rp 25.440.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 18.160.000,00- atau 71,38% dari target semula.
- e) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan ditargetkan sebesar Rp 285.000.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 125.214.400,00- atau 43,93% dari target semula.
- f) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 26.009.600,00- atau 104,04% dari target semula.
- Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan ditargetkan sebesar Rp 25.000.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 26.009.600,00- atau 104,04% dari target semula.
3. Retribusi Perizinan Tertentu ditargetkan sebesar Rp 15.002.000.000,- dan realisasi pencapaiannya sebesar Rp 6.243.930.145,17- atau 41,62%. Adapun faktor yang mempengaruhi tercapai atau tidaknya target adalah tidak tercapainya target Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung



ditargetkan sebesar Rp 14.990.050.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp 6.206.88.000,00- atau 41,41% dari target semula.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan ditargetkan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.663.748.323,67- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.079.761.191,00- atau 64,90% dari target semula. Rincian lebih lanjut realisasi dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah :

1. Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah atas penyertaan modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp. 1.663.748.323,67- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 1.079.761.191,00- atau 64,90% dari target semula.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp. 180.895.484.691,00 dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 204.385.520.517,33 atau 112,99% dari target semula.

## 2. PENDAPATAN TRANSFER

Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 939.777.284.241,33- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 906.194.705.147,00- atau 96,43% pada Pendapatan Daerah tahun 2022. Penerimaan ini terdiri dari :

1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat.

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ditargetkan sebesar Rp. 794.763.838.753,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 778.721.000.729,00- atau 97,98% dari target semula. Penerimaan ini terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak ditargetkan sebesar Rp. 162.373.681.000,00,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 167.642.355.626,00- atau 103,24% dari target semula.



b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) ditargetkan sebesar Rp. 429.554.051.000,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 427.742.257.138,00- atau 99,58% dari target semula.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) yang terdiri dari :

1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik ditargetkan sebesar Rp. 62.721.068.973,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 61.389.147.488,00- atau 97,88% dari target semula.
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik ditargetkan sebesar Rp. 119.754.141.780,00- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 101.586.344.477,00- atau 84,83% dari target semula.

d. Dana Insentif Daerah (DID)

Dana Insentif Daerah (DID) ditargetkan sebesar Rp. 20.360.896.000,- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 20.360.896.000,- atau 100% dari target semula.

2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp. 145.013.445.488,33- dan realisasi pencapaian sebesar Rp. 127.473.704.418,00- atau 87,90% dari target semula.

**b. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022**

Berdasarkan Permendagri Nomor 77 tahun 2020 belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi, Modal dan tak terduga. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.639.213.506.052,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.507.041.629.343,67 atau 91,94%. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan penghitungan sementara atau **un audit** dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai.



*Tabel 12.*  
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>BELANJA</b>	1.639.213.506.052,00	1.507.041.629.343,67	(132.171.876.708,33)	91,94%
<b>BELANJA OPERASI</b>	1.332.589.032.114,00	1.246.579.403.615,03	(86.009.628.498,97)	39,55%
Belanja Pegawai	698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	(48.780.460.929,00)	93,01%
Belanja Barang dan Jasa	585.937.529.587,00	559.998.449.172,95	(25.939.080.414,05)	95,57%
Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	(939.622.930,00)	53,02%
Belanja Hibah	30.959.352.225,00	23.282.916.899,08	(7.679.435.325,92)	75,21%
Belanja Bantuan Sosial	15.456.810.000,00	12.911.808.100,00	(2.545.001.900,00)	83,53%
<b>BELANJA MODAL</b>	306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	(46.130.052.095,36)	84,94%
Belanja Modal Tanah	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	(7.473.140,00)	99,79%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	(9.163.703.004,37)	90,88%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.485.105.586,00	87.323.813.477,02	(17.161.292.108,98)	83,57%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.178.102.211,00	73.340.485.070,99	(16.837.617.140,01)	81,33%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	(2.959.043.702,00)	61,21%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	292.485.131	260.289.017	(32.196.114,00)	88,99%
Belanja Tidak Terduga	292.485.131	260.289.017	(32.196.114,00)	88,99%

Sumber : LRA Pendapatan dan Belanja Data Un Audit (per 31/12/2021) Bidang Akuntansi dan Pelaporan, BPKAD Kota Dumai



Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2022 tersebut terdiri dari:

1) Belanja Operasi

Adapun anggaran belanja operasi kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.332.589.032.114,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.246.579.403.615,03 atau 91,94% yang dialokasikan melalui :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 698.106.313.302,00 dengan realisasi sebesar Rp. 649.325.852.373,00 atau 93,01%.
- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 585.937.529.587,00 dengan realisasi sebesar Rp.559.998.449.172,95 atau 95,57%.
- c) Belanja Bunga sebesar Rp 2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.1.060.377.070,00 atau 53,02%.
- d) Belanja Hibah sebesar Rp. 30.959.352.225,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.282.916.899,08 atau 75,21%.
- e) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp.15.456.810.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 12.911.808.100,00 atau 83,53%.

2) Belanja Modal

Adapun anggaran Belanja Modal Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 306.331.988.807,00 dengan realisasi sebesar Rp. 260.201.936.711,64 atau 84,94% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Modal Tanah Rp. 3.541.754.940,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.534.281.800,00 atau 99,79%
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 100.498.144.002,00 dengan realisasi sebesar Rp. 91.334.440.997,63 atau 90,88%.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 104.485.105.586,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.323.813.477,02 atau 83,57%.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 90.178.102.211,00 dengan realisasi sebesar Rp. 73.340.485.070,99 atau 81,33%
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 7.628.959.068,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.669.915.366,00 atau 61,21%



3) Belanja Tidak Terduga

Adapun anggaran Belanja Tidak Terduga Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 292.485.131,00 dengan realisasi sebesar Rp. 260.289.017,00 atau 88,99% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Tidak Terduga Rp. 292.485.131,00 dengan realisasi sebesar Rp. 260.289.017,00 atau 88,99%

**5. Realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan**

a. Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, ditargetkan sebesar Rp 1.392.335.943.486,00,- realisasi sebesar Rp 1.370.198.448.465,86- tingkat capaian 98,41%, dengan rincian sebagai berikut :

- Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp. 452.558.659.230,00,- dengan realisasi sebesar Rp. 464.003.743.318,86,-
- Pendapatan Transfer ditargetkan sebesar Rp. 939.777.284.241,33,- dengan realisasi sebesar Rp. 906.194.705.147,00,-

Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022 dapat dilihat pada Tabel 13 berikut ini.

Tabel 13. Data Target dan Realisasi Pendapatan Menurut Jenis Pendapatan Kota Dumai Tahun 2022

No.	URAIAN	TARGET APBD P 2022	REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)
	PENDAPATAN DAERAH	1.392.335.943.486,00	1.370.198.448.465,86	98,41%
<b>I</b>	PENDAPATAN ASLI DAERAH	452.558.659.230,00	464.003.743.318,86	97,93%
<b>A</b>	Pajak Daerah	222.013.986,230,00	226.332.093.315,36	101,94%
<b>B</b>	Retribusi Daerah	47.985.440.000,00	32.206.368.295,17	67,12%
<b>C</b>	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	1.663.748.323,67	1.079.761.191,00	64,90%



<b>D</b>	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	180.095.484.691,00	204.385.520.517,33	112,99%
<b>II.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	939.779.284.241,33	906.194.705.147,00	96,43%
<b>A.</b>	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	794.763.838.753,00	778.721.000.729,00	97,98%
<b>B.</b>	Pendapatan Transfer Antar Daerah	145.013.445.488,33	127.473.704.418,00	87,90%
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>1.392.335.943.486,00</b>	<b>1.370.198.448.465,86</b>	<b>98,41%</b>

b. Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja dikelompokkan ke dalam belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga. Secara keseluruhan Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.454.362.356.872,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.314.289.659.257,23 atau 90,37%. Pelaporan realisasi belanja Kota Dumai Tahun 2022 berdasarkan penghitungan sementara atau *un audit* dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai. Dapat dilihat pada tabel 14 berikut ini.

Tabel 14. Data Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Kota Dumai Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
1	2	3	4	5
<b>BELANJA</b>	1.639.213.506.052,00	1.507.041.629.343,67	(132.171.876.708,33)	91,94%
<b>BELANJA OPERASI</b>	1.332.589.032.114,00	1.246.579.403.615,03	(86.009.628.498,97)	39,55%
Belanja Pegawai	698.106.313.302,00	649.325.852.373,00	(48.780.460.929,00)	93,01%
Belanja Barang dan Jasa	585.937.529.587,00	559.998.449.172,95	(25.939.080.414,05)	95,57%
Belanja Bunga	2.000.000.000,00	1.060.377.070,00	(939.622.930,00)	53,02%
Belanja Hibah	30.959.352.225,00	23.282.916.899,08	(7.679.435.325,92)	75,21%
Belanja Bantuan Sosial	15.456.810.000,00	12.911.808.100,00	(2.545.001.900,00)	83,53%
<b>BELANJA MODAL</b>	306.331.988.807,00	260.201.936.711,64	(46.130.052.095,36)	84,94%
Belanja Modal Tanah	3.541.754.940,00	3.534.281.800,00	(7.473.140,00)	99,79%
Belanja Modal Peralatan	100.498.144.002,00	91.334.440.997,63	(9.163.703.004,37)	90,88%



Uraian	Anggaran	Realisasi	Bertambah / (berkurang)	%
1	2	3	4	5
dan Mesin				
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	104.485.105.586,00	87.323.813.477,02	(17.161.292.108,98)	83,57%
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	90.178.102.211,00	73.340.485.070,99	(16.837.617.140,01)	81,33%
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.628.959.068,00	4.669.915.366,00	(2.959.043.702,00)	61,21%
<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	292.485.131,00	260.289.017,00	(32.196.114,00)	88,99%
Belanja Tidak Terduga	292.485.131,00	260.289.017,00	(32.196.114,00)	88,99%

Anggaran Belanja Daerah Kota Dumai pada tahun 2022 tersebut terdiri dari :

1) Belanja Operasi

Adapun anggaran belanja operasi kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.332.589.032.114,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.246.579.403.615,03 atau 91,94% yang dialokasikan melalui :

- a) Belanja Pegawai sebesar Rp. 698.106.313.302,00 dengan realisasi sebesar Rp. 649.325.852.373,00 atau 93,01%.
- b) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 585.937.529.587,00 dengan realisasi sebesar Rp. 559.998.449.172,95 atau 95,57%.
- c) Belanja Bunga sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 1.060.377.070,00 atau 53,02%.
- d) Belanja Hibah sebesar Rp. 30.959.352.225,00 dengan realisasi sebesar Rp. 23.282.916.899,08 atau 75,21%.

2) Belanja Modal

Adapun anggaran Belanja Modal Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 306.331.988.807,00 dengan realisasi sebesar Rp. 260.201.936.711,64 atau 84,94% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Modal Tanah Rp. 3.541.754.940,00 dengan realisasi sebesar Rp. 3.534.281.800,00 atau 99,79%



- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp. 100.498.144.002,000 dengan realisasi sebesar Rp. 91.334.440.997,63 atau 90,88%.
- c) Belanja Modal Gedung dan Bangunan Rp. 104.485.105.586,00 dengan realisasi sebesar Rp. 87.323.813.477,02 atau 83,57%.
- d) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Rp. 90.178.102.211,00 dengan realisasi sebesar Rp. 73.340.485.070,99 atau 81,33%
- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp. 7.628.959.068,00 dengan realisasi sebesar Rp. 4.669.915.366,00 atau 61,21%

3) Belanja Tidak Terduga

Adapun anggaran Belanja Tidak Terduga Kota Dumai pada tahun 2022 sebesar Rp. 292.485.131,00 dengan realisasi sebesar Rp. 260.289.017,00 atau 88,99% yang dialokasikan melalui:

- a) Belanja Tidak Terduga Rp. 292.485.131,00 dengan realisasi sebesar Rp. 260.289.017,00 atau 88,99%.

c. Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

Berdasarkan Peraturan Walikota Dumai Nomor 80 Tahun 2022 tentang Penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 pada pasal 2 yaitu :

Tabel 15.  
Realisasi Pembiayaan Menurut Jenis Pembiayaan

PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	275.730.748.879,25	262.260.776.307,14	95,11%
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	18.000.000.000,00	18.000.000.000,00	100%
PEMBIAYAAN NETTO	257.730.748.879,25	244.260.776.307,14	94,77%

**6. Inovasi Daerah**

I.Strategi Pembangunan Daerah

Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya-upaya operasional yang



bermuaara pada tercapainya visi pembangunan. Menurut Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi harus dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* pembangunan daerah. Disini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategis tersebut menciptakan nilai (*strategic objective*). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategisekaligus untuk menciptakan budaya "berpikir strategik" dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (*learning process*).

## II. Arah Kebijakan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah sebagaimana disebutkan diatas dijabarkan dalam arah kebijakan-kebijakan dan program-program pembangunan. Adapun Arah Kebijakan Pembangunan Kota Dumai Tahun 2021-2026 yang dijabarkan setiap misi sebagai berikut :

**Misi Pertama: Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan Perekonomian kota melalui optimalisasi peran seluruh Stake Holder
- 2) Peningkatan Produktivitas masyarakat
- 3) Peningkatan Daya saing daerah dan Iklim berusaha
- 4) Peningkatan perlindungan sosial
- 5) Peningkatan Peluang Kerja Bagi Masyarakat



6) Peningkatan Koordinasi dan sinergitas lintas sektor untuk ketersediaan pangan daerah.

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pertama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah
2. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Kota Dumai
3. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah

**Misi Kedua : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjati diri Melayu**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1.) Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 2) Peningkatan pelayanan pendidikan masyarakat yang merata dan berkualitas.
- 3) Peningkatan daya beli Masyarakat.
- 4) Peningkatan penerapan budaya melayu di kehidupan masyarakat dan pemerintahan

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi kedua diatas adalah sebagai berikut

- 1) Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Kota Dumai
- 2) Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat Kota Dumai
- 3) Meningkatnya standard hidup layak masyarakat Kota Dumai
- 4) Meningkatnya penerapan budaya melayu

**Misi Ketiga : Mewujudkan Infrastruktur Wilayah Yang Berkualitas.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah
- 2) Peningkatan sistem pengendalian banjir Kota Dumai
- 3) Peningkatan kuantitas dan kualitas kawasan perumahan dan permukiman
- 4) Peningkatan kualias sanitasi perumahan dan pemukiman
- 5) Peningkatan kerjasama daerah dalam pembangunan infrastruktur



- 6) Peningkatan kinerja sistem penyediaan air bersih kota Dumai
- 7) Mewujudkan tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan
- 8) Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang lestari
- 9) Optimalisasi upaya penanganan saat kejadian bencana
- 10) Optimalisasi penanganan pasca kejadian bencana

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi ketiga diatas adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya infrastruktur Kota
2. Terwujudnya penataan ruang daerah yang konsisten
3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan penanganan bencana

**Misi Keempat : Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik.**

Strategi dan Arah Kebijakan yang akan dilaksanakan untuk mencapai misi ini antara lain:

- 1) Peningkatan Profesionalisme penyelenggaraan pemerintahan daerah
- 2) Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah
- 3) Pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan efisien berbasis IT

Adapun rumusan arah kebijakan dari strategi diatas untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi keempat diatas adalah sebagai berikut

1. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik



PEMKO DUMAI

## PENUTUP

Demikian Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (R-LPPD) Kota Dumai Tahun 2022 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Didalam Laporan ini dijelaskan tentang informasi utama penyelenggaraan Pemerintah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Publik dengan muatan informasi sebagai berikut yakni Capaian Kinerja Makro, capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pelayanan dasar, hasil evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) dan Opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun sebelumnya, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran daerah, realisasi penerimaan menurut jenis penerimaan dan realisasi pengeluaran menurut jenis pengeluaran dan realisasi pembiayaan menurut jenis pembiayaan dan Inovasi daerah

Sangat disadari bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak terlepas dari adanya permasalahan-permasalahan maupun kendala sehingga Program dan Kegiatan yang sudah direncanakan tidak berjalan dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, baik permasalahan maupun kendala yang dihadapi dapat diselesaikan sehingga tidak menjadi penghambat dalam melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada. Permasalahan, kendala maupun kelemahan-kelemahan yang ada pada Tahun Anggaran 2022 dijadikan sebagai pemicu dan pemacu untuk meningkatkan kinerja aparatur Pemerintah khususnya serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada tahun yang akan datang.

Kita berharap pada tahun mendatang, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik, lancar, aman, sukses sebagaimana yang diharapkan.

Dumai, April 2023

**WALIKOTA DUMAI**

**H. PAISAL, SKM, MARS**